

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indo Pos

## Tata Kelola TIM Dibahas Ulang

### Pengelolaan TIM ibaratnya sebuah investasi kebudayaan, tidak bisa dinilai dari sisi profit saja.

JAKARTA – Tata kelola manajemen Taman Ismail Marzuki (TIM) dan penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Nasional menjadi isu krusial yang dibahas antara Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid, dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, Selasa (4/4).

"Pekan Kebudayaan Nasional sebagian kegiatan akan berlangsung di DKI menggunakan fasilitas Pemprov. Jadi, saya izin Gubernur," kata Hilmar di Balai Kota. Lebih lanjut, Hilmar mengatakan bahwa pembahasan mengenai TIM fokus pada rencana kegiatan dan program selama setahun ke depan.

"Kita fokus ke kegiatan dan program karena tata kelola baru bisa jalan ketika barangnya dipakai. Misalnya tidak ada kegiatan atau segala macam, maka kita susah, diskusinya jadi

abstrak," ujar Hilmar. Kemudian, ke depannya akan ada pembahasan penyusunan kalender kegiatan dalam waktu dekat.

"Kita akan diskusi lebih dalam menyusun kalender selama setahun. Habis Lebaran baru mau ketemu duduk bareng dengan semua pihak. Kita masing-masing mengerjakan PR dan usulan-usulan. Setelah Lebaran, kita bisa punya kalender lebih lengkap," jelas Hilmar.

Adapun program yang sudah diproduksi dan memiliki kualitas bagus akan dilaksanakan lebih dulu. "Kan sudah cukup banyak program yang diproduksi. Artinya telah pernah buat dan kualitasnya bagus. Mungkin itu akan didulukan karena relatif lebih mudah dilaksanakan," tandasnya.

### Dikaji Ulang

Sementara itu, menurut Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana, saat ini sedang mengkaji pengelolaan TIM melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). "Kami tengah mengkaji ulang sebaiknya pengelolaan TIM ke depan," ujar Iwan.

Hal ini, menurutnya, sesuai dengan arahan Gubernur usai berdiskusi dengan Hilmar.

Dia menjelaskan pengelolaan TIM ibaratnya sebuah investasi kebudayaan, tidak bisa dinilai dari sisi profit. Iwan juga menuturkan, dasar pengelolaan TIM merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 63 Tahun 2019. Isinya, 5 dari 7,2 hektare dikelola PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro). Sisanya dikelola oleh PKJ TIM. Unit PKJ TIM saat ini bertransformasi menjadi BLUD.

Pengkajian pengelolaan TIM tersebut dilakukan untuk melihat kembali yang lebih baik dari sisi tata kelola ke depannya. Arahannya, sesuai dengan prinsip-prinsip menjaga integritas. Kemudian, efisiensi dan tidak memberatkan anggaran Pemprov terus-menerus.

Iwan berharap ke depannya program-program dapat berjalan baik. "Sekarang masih transisi, mudah-mudahan program-program yang direncanakan dapat berjalan baik," jelasnya.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI, Eneng Malianasari, minta Pemerintah Provinsi DKI meng-



**BAHAS PROGRAM** | Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menerima kunjungan Dirjen Kemendikbudristek RI, Hilmar Farid di Ruang Tamu Utama Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/4). Pertemuan ini membahas Tata Kelola Manajemen TIM dan program kalender event.

atur wewenang Jakpro dalam mengelola TIM. Pemprov harus mengkaji kembali kewenangan Jakpro dalam mengelola TIM. "Jangan melulu berorientasi bisnis," tegas Eneng.

Penegasan itu disampaikan terkait pembatalan gelaran tahunan Bulan Film Nasional (BFN) 2023 oleh Komite Film Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), yang mestinya digelar 25 Ma-

ret-2 April. Pembatalan itu terganjal izin pemakaian ruang putar Kineforum TIM. "Aspek seni dan keberlangsungan program mesti diperhatikan. Sebab bagaimanapun TIM dibangun 100 persen dengan APBD DKI.

Demikian juga dengan program-programnya. Jadi, pemanfaatannya harus mengutamakan kebutuhan masyarakat," jelas Eneng. ■ **Ant/wid/G-1**